

NASKAH PUBLIKASI
KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS 2010-2018



Disusun Oleh :

NURINAYAH

20161060018

PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini saya selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta :

Nama : Nurinayah

NIM : 20161060018

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasi untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 5 September 2018

Nurinayah

ABSTRAK

KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 2010-2018

Nurinayah

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Nurinayah490@yahoo.com

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai kebijakan *disability-friendly* yang dimiliki oleh Australia terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Permasalahan mengenai pelayanan disabilitas telah menjadi *concern* utama Pemerintah Australia. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan berskala nasional terkait disabilitas yaitu *National Disability Strategy*. Kebijakan NDS telah disusun dengan konsep *universal design* dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *UN Convention on the Right of People with Disabilities* (UNCRPD) dan mencakup semua sektor kehidupan secara lebih komprehensif. Dalam implementasinya, pemerintah bekerja sama dengan semua pihak termasuk didalamnya NGO dan penyandang disabilitas. Kemudian, semua pihak ikut terlibat dalam proses perumusan dan realisasi kebijakan, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam pelayanan hak penyandang disabilitas di Australia.

Kata Kunci : *Disability-friendly policy*, UNCRPD, NDS

ABSTRACT

AUSTRALIAN POLICIES RELATED TO FULFILLMENT THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES 2010-2018

Nurinayah

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Nurinayah490@yahoo.com

This research will explain about the disability-friendly policy that Australia has in relation to the fulfillment of the rights of persons with disabilities. Problems regarding disability services have become a major concern of the Australian Government. To overcome this problem, the Australian Government issued a national scale policy on disability, namely the National Disability Strategy. NDS policy has been compiled with the concept of universal design and in accordance with the values contained in the UN Convention on the Right of People with Disabilities (UNCRPD) and covers all sectors of life more comprehensively. In its implementation, the government works with all parties including NGOs and people with disabilities. Then, all parties are involved in the process of formulation and policy realization, so that there is a significant increase in the service of the rights of persons with disabilities in Australia.

Keywords : *Disability-friendly policy*, UNCRPD, NDS

A. Pendahuluan

Australia menjadi salah satu negara maju dengan perkembangan isu terkait kemanusiaan yang signifikan, termasuk didalamnya terkait penanganan terhadap disabilitas. Isu terkait disabilitas menjadi salah satu sektor kemanusiaan yang telah lama berkembang di Australia. Lebih lanjut, tahun 1980 menjadi tahun penting bagi perkembangan layanan disabilitas dunia, PBB sebagai lembaga keamanan dunia mulai menyerukan untuk peningkatan layanan dan sikap anti-diskriminasi terhadap disabilitas (UN, 2014). Keadaan ini menjadi salah satu pendorong Pemerintah Australia untuk secara resmi mengadopsi landasan hukum terkait penanganan disabilitas.

Pada tahun 1992, Pemerintah Australia telah memiliki regulasi khusus perlindungan terhadap disabilitas yaitu *Disability Discrimination Act*, yang menjadi landasan utama pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait disabilitas (AHRC, 2018). Lebih lanjut, Pemerintah Australia menggunakan pendekatan medis (*medical approach*), dengan bentuk institusional dan meliputi beberapa sektor layanan disabilitas seperti rehabilitasi dan biaya kesehatan. Bentuk implementasi kebijakan ini mendapatkan respon negatif dari mayoritas penyandang disabilitas Australia. Dikarenakan pendekatan tersebut cenderung menempatkan disabilitas sebagai suatu kelainan fisik dan psikis yang hanya membutuhkan penanganan medis dan rumah rehabilitasi saja, dan menuntut untuk terjadinya perubahan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhan mereka secara lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan. Pada tahap ini Pemerintah Australia telah memiliki landasan hukum terkait disabilitas, akantetapi masih menemui hambatan dalam ranah implementasi. Proses penanganan terkait disabilitas masih belum terjalin secara komprehensif dan koordinatif.

Pada tahun 2008, Australia menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* dan menjadi *one of the first western countries* yang menandatangani dan meratifikasi konvensi disabilitas, sebagai bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah Australia untuk membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dunia (DFAT, 2009).

Konvensi CRPD membahas mengenai hak asasi para penyandang disabilitas secara komprehensif, dimana para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak asasi dan kebutuhan yang sama dengan non-disabilitas. Konvensi ini telah menunjukkan perubahan paradigma internasional akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara lebih *universal* serta komprehensif. Untuk kemudian memandang isu disabilitas dalam dimensi serta pendekatan yang lebih luas dan meliputi multisektor (*right based*). Kemudian, UNCRPD dimanifestasikan dalam 30 artikel terkait hak-hak yang harus dipenuhi suatu negara terhadap warga negara yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. CRPD telah ditanda tangani oleh 160 negara dan diratifikasi oleh 175 negara (UNCRPD, 2009). Nilai dan norma yang tercantum dalam UNCRPD menjadi pedoman utama Pemerintah Australia dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Menurut data *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 15 % populasi dunia mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Mayoritas penyandang disabilitas diperkirakan tinggal di negara berkembang, prevalensi kecacatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia penduduk (Lord, 2010). Menurut data UNESCAP, Asia-Pasifik memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tinggi mencapai 690 juta orang. Banyak dari penyandang disabilitas yang masih terpinggirkan serta terkecualikan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhannya (UNESCAP, 2012).

Pada tahun 2009, Pemerintah Australia melakukan observasi dan penelitian evaluatif dalam skala nasional terkait masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, yang dimanifestasikan dalam laporan pemerintah yang berjudul "*Shut Out: The Experience of People with Disabilities and Their Families in Australia*". Laporan ini mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk membuat sebuah rencana reformasi komprehensif disabilitas nasional yang baru, Inisiatif ini mendapatkan respon positif dari semua pihak (NDSCR, 2009).

Pada tahun 2010, menurut *Australian Bureau of Statistics* menyatakan bahwa hampir satu dari lima orang Australia melaporkan hidup dengan disabilitas. Sebanyak 18,5% atau 4 juta penyandang disabilitas dimiliki oleh Australia. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 21% penyandang disabilitas memiliki kondisi kesehatan jangka panjang yang membatasi kegiatan sehari-hari mereka. Sebanyak 79% dari mereka memiliki keterbatasan tertentu seperti gangguan yang membatasi kemampuan untuk melakukan komunikasi, mobilitas, serta keterbatasan yang terkait dengan akses sekolah atau pekerjaan (ABS, 2010). Pada tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas mencapai 4,3 juta orang atau mencapai 18,3 % dari jumlah keseluruhan penduduk Australia (ABS, 2015). Mayoritas dari mereka menginginkan agar Pemerintah Australia memenuhi hak dan kebutuhan mereka dalam multisektor.

Lebih lanjut, Pemerintah Australia melakukan reformasi komprehensif terhadap kebijakan terkait penyandang disabilitas. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan skala nasional untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yaitu *National Disability Strategy 2010-2020*, dengan dua tahap implementasi yaitu *Laying the ground work 2011-2014* dan *Driving Action 2015-2018* (SCARCI, 2014). Akan tetapi, dalam proses implementasinya tahap pertama terdapat pro dan kontra dari organisasi penyandang disabilitas. *Australian Federation Disability Organization (AFDO)* menyatakan dalam proses implementasi penyandang disabilitas belum secara komprehensif diikutsertakan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Hal yang serupa juga di sampaikan oleh *Disabled People's Organizations Australia*, yang menyatakan bahwa dalam Strategi Nasional Disabilitas Australia juga harus memperhatikan pemenuhan hak penduduk asli Australia yaitu penduduk aborigin penyandang disabilitas.

Pemerintah Australia melakukan perbaikan kebijakan sesuai dengan masukan dari penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas. Kebijakan ini mendapat respon positif dari para penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas. Australia melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan NDIA, NGO serta institusi yang *concern* terhadap advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bersinergi bersama dalam realisasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Australia. Australia menjadi salah satu negara maju yang diakui secara internasional, sebagai pendorong utama pengembangan dan pembangunan hak serta potensi

penyandang disabilitas. Kemudian, dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki kebijakan yang ramah/*friendly* terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian memiliki ketertarikan untuk menganalisa mengenai Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan oleh penulis ialah bagaimana Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis secara mendalam dan detail dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai dan diharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai paket kebijakan *disability-friendly* yang Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Situs penelitian yang dipilih meliputi beberapa instansi terkait yaitu DUBES Australia, AFDO, Kemensos, PSHK, CIQAL, OHANA Indonesia dan individu penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan pelatihan terkait pelayanan disabilitas di Australia. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan antara lain wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai kebijakan ramah disabilitas Australia maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep *disability-friendly* dan konsep *public policy*. Konsep *disability-friendly* menurut Marianne S Huger, terkait pada proses untuk menciptakan sebuah situasi atau keadaan yang benar-benar inklusif bagi individu penyandang disabilitas melalui desain universal, yang merujuk pada sebuah ideologi yang menghargai keragaman dan sosial inklusif. Sementara konsep *public policy* menurut Thomas R Dye, merujuk pada merupakan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dalam ranah publik. Dan bentuk tanggung jawab berupa kebijakan tersebut harus meliputi berbagai aspek kehidupan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang yang luas dan multisektor.

Disabilitas menjadi isu kemanusiaan yang terjadi di era globalisasi dan menjadi salah satu isu dalam politik afirmasi. Dimana isu kemanusiaan terkait disabilitas yang sebelumnya yang cenderung tidak menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan, perlahan mulai berubah. Lebih lanjut, penyandang disabilitas yang sebelumnya menjadi objek dalam proses implementasi kebijakan mulai menyuarakan diri untuk dapat menjadi subjek dalam proses *decision-making* hingga implementasi. Para penyandang disabilitas mulai menunjukkan keberanian mereka untuk membawa isu disabilitas kedalam ranah politik yang lebih legal, dan menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan mereka mengakses hak-hak fundamental.

Kemudian, langkah afirmatif menjadi langkah yang diambil oleh penyandang disabilitas, untuk meningkatkan representasi disabilitas dan minoritas dalam sektor aksesibilitas fisik dan non-fisik, ketenagakerjaan, pendidikan, budaya yang sebelumnya mereka telah secara historis dikecualikan. Lebih lanjut, nilai dan norma internasional seperti UNCRPD menjadi *framework* baru yang digunakan oleh negara-negara yang meratifikasinya untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait disabilitas, termasuk diantaranya yaitu Australia. Konsep universal desain yang komprehensif dan meliputi multisektor menjadi wujud tujuan yang ingin dicapai melalui Kebijakan *National Disability Strategy 2010-2020* oleh Pemerintah Australia. Lebih lanjut, dalam proses implementasi kebijakan Pemerintah Australia bekerjasama dengan NGO seperti NDIA dan AFDO untuk mengimplementasikan kebijakan terkait.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1. National Disability Strategy 2010-2020

National Disability Strategy merupakan kebijakan jangka panjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas. NDS 2010–2020 merupakan kebijakan nasional yang mencakup desain universal untuk meningkatkan pelayanan dan akses manfaat bagi

masyarakat Australia penyandang disabilitas. Kerangka kerja sepuluh tahun untuk mendorong peningkatan di seluruh kebijakan, program, layanan dan infrastruktur *mainstreaming* serta sistem layanan khusus penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang setara dan memiliki akses yang sama.

Dengan kata lain, strategi ini mengikat semua Pemerintah Australia untuk mengambil tanggung jawab atas komitmen Australia terhadap Konvensi PBB, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akses dan hasil layanan yang baik bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini disetujui oleh semua tingkat Pemerintah Australia. Adanya komitmen antara semua tingkat pemerintah, organisasi dan penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadikan strategi ini lebih produktif untuk memenuhi hak disabilitas. Pendekatan nasional yang terpadu dan program pembangunan menjadi agenda utama yang diperkenalkan melalui NDS terhadap Masyarakat Australia.

NDS memiliki enam fokus tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yaitu *inclusive and accessible communities, rights protection, justice and legislation, economic security, personal and community support, learning and skill, health and wellbeing*. NDS menjadi wujud komitmen Pemerintah Australia untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UNCRPD. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan NDS, Pemerintah Australia membaginya menjadi dua tahap kebijakan yang telah di implementasikan yaitu tahap pertama yang diberi nama sebagai *Laying Groundwork 2011-2014*, dan tahap kedua yang sedang berjalan yaitu *Driving Action 2015-2018*.

Dalam tahap pertama implementasi kebijakan NDS yaitu *Laying Groundwork 2011-2014*, fokus utama terletak pada proses *mainstreaming* kebijakan, penetapan dasar-dasar, perencanaan dan penyampaian program layanan utama bagi disabilitas. Pemberian pemahaman terkait NDS menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk menjamin proses implementasi tahap berikut kedepannya. Lebih lanjut, penulis melakukan identifikasi terkait pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia melalui implementasi tahap pertama sebagai berikut ;

a) *Inclusive and accessible communities*

Pemerintah Australia melakukan pembaharuan kebijakan sistem pengaturan dan perancangan terkait desain bangunan, serta transportasi *Access to Premises-Buildings Standards 2010* dan *Disability Standards to Accessible Public Transport* (cities, 2011). Kebijakan ini menetapkan standar-standar pembangunan bangunan dan penyediaan transportasi umum di Australia. Semua negara bagian dan teritori memiliki kewajiban untuk mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan melalui kebijakan tersebut. Lebih spesifik, terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi oleh *provider* transportasi di Australia seperti penyediaan pintu yang lebih besar, penyediaan *low-entry* disetiap transportasi umum, pemberian *special sign* untuk penumpang pengguna kursi roda. Sementara pemerintah menyediakan halte bis yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, penyesuaian jarak antara jarak bis dengan trotoar, penyediaan *guiding block* disetiap halte bis. Dalam prosesnya, Pemerintah Australia membuat inovasi terkait transportasi umum untuk penyandang disabilitas seperti smart bus dan transperth.

Lebih lanjut, Inovasi terkait transportasi umum juga ikut berkembang dalam ranah pengadaan bus sekolah khusus bagi disabilitas. Seperti halnya yang terjadi di *New South Wales*, pemerintah telah menyediakan 1200 layanan bus sekolah khusus di *Sydney* dan sejumlah besar layanan bus sekolah khusus setiap hari di daerah pedesaan. Siswa penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan bus sekolah khusus, dapat menggunakan layanan alternatif yang umumnya disediakan oleh layanan taksi yang dapat diakses kursi roda. Di *Sydney*, sekitar 600 dari 800 taksi yang dapat diakses kursi roda menyediakan "*school runs*". Kemudian di *Victoria*, 80 % layanan bus sekolah dapat diakses pengguna kursi roda pada hari kerja (Killens, 2014).

Australia dapat dikatakan telah memiliki transportasi dan fasilitas umum yang ramah, untuk membantu mobilisasi penyandang disabilitas dalam keseharian mereka. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Arni Surwanti, sebagai perwakilan *Difable Person Organization* (DPO) yang pernah

mendapatkan pelatihan *International Mental Leadership Program* di Australia. Menyatakan bahwa aksesibilitas terkait transportasi dan fasilitas umum di Australia sangat inovatif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas umum untuk membantu mobilisasi aktifitasnya (Surwanti, 2018).

b) *Rights protection, justice and legislation*

Tujuan kedua yang ingin dicapai oleh NDS ialah perlindungan hak, keadilan dan legislasi termasuk didalamnya seperti tindakan anti-diskriminasi, mekanisme pengaduan, sistem pemilihan dan peradilan. Pemerintah Australia membuat *National Disability Advocacy Program*, dengan tujuan utama untuk memberi penyandang disabilitas akses advokasi disabilitas yang efektif yang mempromosikan, melindungi, dan memastikan kenikmatan penuh dan setara dari semua hak asasi manusia yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Australia memberikan dana advokasi sebesar \$ 16,5 juta di bawah program NDAP untuk mendanai 59 organisasi di seluruh Australia.

Dalam ranah negara bagian dan teritori, Pemerintah Victoria mendirikan pusat peradilan disabilitas atau *disability justice centre* pertama di Australia. *Pusat peradilan ini* menyediakan akomodasi yang aman untuk penyandang disabilitas yang telah melakukan pelanggaran akantetapi memiliki kondisi yang memungkinkan untuk dikurung dalam penjara pada umumnya (Australia G. o., 2014). Meskipun pembangunan pusat peradilan disabilitas saat ini masih terbatas, inisiasi ini telah mendapatkan banyak perhatian dari pemerintahan pusat, negara bagian dan teritori lainnya sebagai tindakan yang patut dicontoh.

Dalam ranah sistem pemilu terjadi perubahan yang signifikan dimana Pemerintah Australia mulai menerapkan sistem pemilu berbasis telepon bahkan *online*. Tahun 2010, pada saat Pemilu Federal berlangsung *Australian Election Commission* menerima *voting* yang diberikan oleh pemilih yang memiliki kebutuhan khusus seperti kebutaan atau *low vision* untuk dapat melakukan pemilihan melalui telepon. Pada tahun 2011, Pemerintah *New South Wales* juga

melakukan hal yang sama dengan menerapkan proses *voting* berbasis telepon dan online yaitu iVote bagi penyandang disabilitas. Meskipun dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang memiliki penglihatan yang terganggu, sistem *voting* ini dapat menjadi alternatif lain yang dapat digunakan selain *voting* pos (Devenish, 2013). Sistem *voting* basis telepon dan *online* yang dilakukan *New South Wales* dinyatakan sukses dan mengundang banyak *feedback* positif.

c) *Economic security*

Tujuan ketiga yang ingin dicapai melalui NDS ialah keamanan ekonomi. Di tingkat nasional Pemerintah Australia telah bekerja untuk meningkatkan permintaan terhadap perusahaan - perusahaan di Australia. Peningkatan permintaan terhadap sumber daya manusia penyandang disabilitas menjadi target utama pemerintah agar mereka dapat mendapatkan dan tetap bekerja. Departemen ketenagakerjaan melalui *Wage Connect initiative* telah menghasilkan lebih dari 13.700 orang penyandang disabilitas yang ditempatkan dalam pekerjaan selama inisiatif ini. Pada tahun 2012, Komisi Layanan Publik Australia memperkenalkan strategi *the As One - Australian Public Service* (APS) untuk meningkatkan tingkat perekrutan tenaga kerja dari penyandang disabilitas melalui *Australian Public Service* (APS) antara tahun 2012 dan 2014 (Services D. o., 2014). APS juga mengembangkan proses konsultasi terkait keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk kemudian diarahkan dalam mencari pekerjaan. Menurut *Australian Bureau of Statistics* menyatakan bahwa 85 % penyandang disabilitas mayoritas bekerja dalam sektor privat.

Lebih lanjut, *Disability Employment Services* juga memberikan bantuan untuk mengatasi hambatan pekerjaan dan untuk mendukung individu penyandang disabilitas di tempat kerja. Pemerintah menginvestasikan lebih dari \$ 3 miliar selama empat tahun untuk membuka akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, dan memastikan untuk didapatkannya dukungan yang mereka butuhkan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan

Kementerian Sosial Indonesia yaitu Santi Utami Dewi pada saat melakukan kunjungan terkait implementasi NDS, dinyatakan bahwa Departemen Pelayanan Ketenagakerjaan memberikan subsidi terhadap perusahaan yang menerima penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan tersebut dan hal ini patut dicontoh untuk menciptakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas dalam sektor privat (Santi Utami Dewi, 2018).

Dalam ranah negara bagian dan teritori, inisiatif terkait kebijakan ketenagakerjaan banyak terjadi. Pendekatan inovatif lainnya adalah produksi DVD oleh Pemerintah Tasmania untuk mendorong bisnis negara untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Sementara itu, Pemerintah *New South Wales* mengeluarkan program layanan transisi keluarga atau *Transition to Work (TTW) programme*, untuk mendukung penyandang disabilitas muda untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pada tahun 2013–14, 68,6% lulusan dari program ini mendapatkan pekerjaan atau pendidikan lanjutan (Services D. o., 2014).

d) *Personal and community support*

Tujuan ke empat merujuk kepada dukungan personal dan komunitas, termasuk didalamnya inklusi dan partisipasi dalam kemasyarakatan. Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *National Disability Insurance Scheme* sebagai bentuk dukungan signifikan dalam ranah personal dan komunitas bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini menerapkan pendekatan *person-centered* dalam proses realisasinya. Untuk mengakses NDIS, penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan akses, individu yang memenuhi persyaratan akan disebut sebagai partisipan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seperti ; pertama, memastikan ketersediaan NDIS diwilayah tempat tinggal. Kedua, partisipan harus berumur dibawah 65 tahun pada saat mengakses NDIS. Ketiga, terkait residensi partisipan harus merupakan Warga Negara Australia, memegang visa permanen atau visa kategori khusus yang dilindungi. Keempat, terkait keadaan fisik, partisipan memiliki gangguan atau kondisi yang cenderung permanen. Lebih lanjut, memiliki kerusakan substansial yang mengurangi kemampuan

partisipasi untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari, dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Serta memerlukan dukungan dari NDIS seumur hidup untuk membantu kehidupan.

Pada tahun 2013, NDIS mulai dikenalkan kepada Masyarakat Australia sebagai alternatif pendanaan yang berbentuk asuransi sosial. NDIS merupakan rancangan inti dari reformasi ekonomi dan sosial yang akan memberikan keadilan, keamanan, dan peluang bagi lebih dari 460.000 (tahun 2019) Masyarakat Australia dan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan atas dasar keadilan (Services D. o., 2014). NDIS memberikan jaminan sosial dalam bentuk asuransi bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat. Dalam jangka waktu implementasi kebijakan NDIS tahap pertama 2011-2014, semua yurisdiksi negara bagian telah menandatangani dan menyetujui NDIS.

Skema asuransi sosial ini pertama kali diluncurkan sebagai uji coba (*trial*) pada tiga wilayah yaitu *Australian Capital Territory*, *Northern Territory* dan *Western Australia*. Proses realisasi NDIS mendapatkan respon positif dari penyandang disabilitas Australia. Pada tahun 2014, dari 8,585 partisipan yang telah mengakses NDIS, sebanyak 7,316 yang diterima (Services D. o., 2014). Mayoritas dari partisipan menyatakan kepuasannya akan NDIS, dan menyatakan bahwa sistem asuransi ini membantu mereka untuk lebih mudah mengakses layanan sesuai dengan tingkat disabilitas yang mereka miliki. Pemerintah Australia (Federal) menyediakan dana sebesar \$ 1,5 miliar untuk proses realisasi NDIS (*trial*) 2013-2014.

e) *Learning and skill*

Tujuan utama yang ingin dicapai ialah penyandang disabilitas dapat mencapai potensi penuh mereka, melalui partisipasi dalam sistem pendidikan berkualitas tinggi inklusif dan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan berkualitas tinggi dan pelatihan yang ditargetkan secara universal diakui oleh Pemerintah Australia, sebagai prasyarat penting untuk mendapatkan kemandirian dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Pemerintah Australia mencoba untuk menyelaraskan aspirasi dan kapasitas untuk dapat mencapai

tingkat pencapaian personal yang tidak berbeda untuk penyandang disabilitas dan Masyarakat Australia lainnya.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil sekolah dan pendidikan untuk semua siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas. Melalui pendekatan *Student First*, Pemerintah Australia bekerjasama dengan negara bagian dan teritori untuk membuat perbedaan nyata bagi semua siswa dengan berfokus pada bidang utama otonomi sekolah, guru berkualitas, kurikulum yang efektif, dan keterlibatan orang tua. Proses pendampingan ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan kepada para siswa penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan mereka. Lebih lanjut, Pemerintah Australia (Federal) memberikan dukungan pendanaan yang lebih banyak terhadap inisiatif pendidikan siswa penyandang disabilitas dan telah menginvestasikan \$ 300 juta selama tahun ajaran 2012 hingga 2014.

Pada tahun 2012, penyandang disabilitas dalam usia kerja (16-64 tahun) yang menyelesaikan kualifikasi pendidikan *post-school* meningkat sebesar 5%. Lebih lanjut, mayoritas penyandang disabilitas (67 % dari mereka yang berusia 5-20 tahun) mengambil bagian di kelas reguler di sekolah umum. Kemudian, 20 % dari mereka menghadiri kelas khusus di sekolah umum dan 13 % menghadiri kelas khusus (Services D. o., 2014).

Selanjutnya, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Santi Dewi Utami yang menyatakan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas di Australia sudah inklusif dan mudah diakses. Pada saat melakukan kunjungan terkait realisasi NDS di *Flinders University*, pihak kampus menyediakan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Misalnya, mahasiswa tersebut seorang tuna rungu maka pihak kampus akan memfasilitasinya *note-taken* untuk setiap mata kuliah yang dikuti oleh mahasiswa tersebut. Lebih lanjut, pihak setiap kampus memiliki unit khusus terkait disabilitas yang membantu melayani semua kebutuhan penyandang disabilitas. Disamping itu, pihak kampus juga menyediakan rekaman mata kuliah dan buku berbasis braile.

Disabilitas tidak menjadi halangan bagi masyarakat Australia untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi dan penyediaan fasilitas fisik dan non-fisik bagi siswa penyandang disabilitas telah menjadi hal yang umum dalam sektor pendidikan Australia. Menurut Faris Al-Fadhat, menyatakan bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas tidak menjadi hambatan yang berarti dalam menempuh pendidikan. Mahasiswa penyandang disabilitas sangat mudah ditemui dalam lingkungan kampus dan mereka baik-baik saja dengan keadaan mereka karena pihak kampus memfasilitasi mereka sesuai dengan standar universal (Al-Fadhat, 2018). Dalam artian mahasiswa penyandang disabilitas diberikan fasilitas yang sama dengan mahasiswa pada umumnya.

f) *Health and wellbeing*

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui bidang ini ialah menciptakan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, termasuk didalamnya layanan kesehatan, promosi kesehatan dan interaksi antara sistem kesehatan disabilitas.

Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan kebijakan melalui Departement Kesehatan telah memperluas jenis pembiayaan pengobatan melalui program *DisabilityCare* or *Medicare Program*. *Medicare* merupakan layanan Pemerintah Federal yang menyediakan pembayaran dan layanan untuk perawatan kesehatan dan obat-obatan. Dan termasuk didalamnya perawatan rumah sakit umum gratis, bantuan biaya perawatan di luar rumah sakit, dan obat-obatan bersubsidi. Dibawah NDS, Pemerintah Federal Australia melakukan pendekatan universal dan berkomitmen untuk memperluas keterlibatan serta keterwakilan penyandang disabilitas diseluruh demografi Australia. Pemerintah Australia akan menyediakan \$ 19,3 miliar selama tujuh tahun, mulai dari 2012-13 untuk meluncurkan *DisabilityCare* Australia di seluruh Pemerintahan Australia (Australia C. o., 2013).

Di *Victoria*, sebuah proyek peningkatan kesadaran (*awareness-raising project*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, akan perlu dilakukannya *screening* terkait penyakit kanker di antara lebih dari 7.000 wanita

dengan disabilitas intelektual. Para wanita didorong untuk mendiskusikan pemeriksaan kesehatan dengan dokter umum mereka dan melakukan tes kesehatan terkait. Pada tahun 2013, proyek ini juga memasukkan pelatihan bagi staf layanan disabilitas untuk mendukung para wanita selama proses tersebut.

Pemerintah Australia Barat, membangun pendekatan inklusif untuk layanan kesehatan melalui pembentukan *Disability Health Network*. Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kemudian menginformasikan serta mempengaruhi pengembangan sistem kesehatan Australia Barat. Pada akhir 2014, tercatat 3.227 orang terdaftar sebagai anggota *Disability Health Network*, termasuk para profesional layanan kesehatan, keluarga, tenaga pegasuh dan penyandang disabilitas (Services D. o., 2014).

Pada tahap kedua implementasi kebijakan NDS yaitu *Driving Action 2015-2018*, fokus implementasi kebijakan oleh Pemerintah Australia tertuju pada proses implementasi lanjutan terkait *project* dan program-program yang telah direncanakan pada saat tahap pertama implementasi NDS. Pada tahap kedua rencana implementasi, Pemerintah Australia secara spesifik akan memfokuskan implementasi kebijakan terkait transisi NDIS secara penuh dan peningkatan kualitas pelayanan disabilitas terhadap penduduk aborigin dan kepulauan (*aboriginal and torres strait islander people with disability*). Dengan menjadikan NDIS sebagai skema utama asuransi nasional yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas Australia, untuk memperoleh kebutuhannya dari semua sektor kehidupannya.

a) Transisi implementasi NDIS

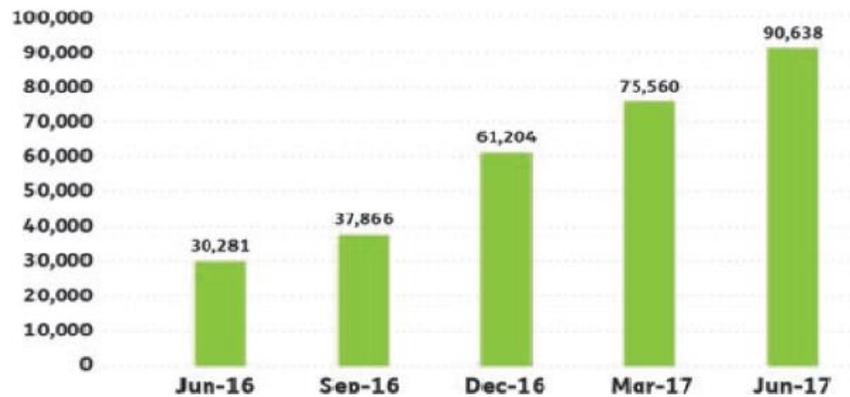
Pada tahap ini, transisi implementasi NDIS untuk menjadi skema asuransi layanan disabilitas komprehensif, dan di implementasikan diseluruh wilayah Australia menjadi fokus utama realisasi kebijakan Pemerintah Australia. NDIS merupakan kebijakan asuransi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas permanen untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Dengan menggunakan pendekatan *person-centered* dan konsep *universal design*, NDIS menjadi kebijakan inti dari NDS

untuk memenuhi hak penyandang disabilitas Australia. Skema asuransi nasional disabilitas menjadi program implementasi yang ditujukan untuk 460.000 penyandang disabilitas di Australia untuk dapat mendapatkan akses jaminan terhadap semua kebutuhannya.

Pada tahun 2013 (tahap pertama implementasi), NDIS pertama kali di kenalkan dalam bentuk uji coba (*trial*) kepada Masyarakat Australia sebagai skema asuransi sosial untuk menjamin semua kebutuhan disabilitas dari berbagai sektor kehidupan. Pada saat itu, NDIS hanya di implementasikan kepada tiga negara bagian dan teritori Australia seperti *Australian Capital Territory*, *Northern Territory* dan *Western Australia* dan mendapatkan respon positif dari penyandang disabilitas Australia. Berlandaskan pada pencapaian ini, Pemerintah Australia kemudian melakukan kebijakan transisi NDIS keseluruhan negara bagian dan teritori Australia. Pada proses ini, mayoritas negara bagian dan teritori telah menandatangani perjanjian bilateral antar negara bagian dan teritori untuk mengimplementasikan NDIS secara penuh dalam semua sektor layanan kebutuhan disabilitas. Negosiasi terkait perjanjian bilateral untuk transisi NDIS dengan *Western Australia* terus berlanjut.

Setelah melakukan perjanjian bilateral, setiap negara bagian dan teritori memiliki kewajiban untuk merealisasikan NDIS kedalam sistem layanan disabilitas masing-masing pemerintah. Lebih lanjut, pada akhir tahun 2016-2017, evaluasi terkait realisasi kebijakan NDIS (*full scheme*) telah dilakukan dan menunjukkan suatu peningkatan yang signifikan. Partisipan NDIS pada tahun ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan peningkatan hasil dan respon positif masyarakat penyandang disabilitas terhadap realisasi NDIS. Berikut ini terdapat grafik yang menunjukkan mengenai peningkatan akses NDIS oleh penyandang disabilitas Australia.

Bagan 4.1 Jumlah Partisipan Akses NDIS 2016-2017



Sumber : (Services D. o., NDIS Annual Report, 2017)

Pada pertengahan Juni 2016 jumlah partisipan yang dapat mengakses NDIS berjumlah 30.281 partisipan, dan pada bulan September jumlah partisipan meningkat menjadi 37.866 partisipan. Pada Desember 2016, terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah partisipan NDIS yaitu 61.204 partisipan. Pada bulan Maret 2017, jumlah partisipan kembali meningkat dan mencapai 75.560 partisipan. Lebih lanjut, pada bulan juni jumlah partisipan yang mengakses NDIS mencapai 90.638 partisipan. Dan pada 31 Desember 2017, jumlah partisipan yang secara resmi bergabung dengan NDIS mencapai 142.000 partisipan (NDIS, 2018). Menurut laporan NDIS 2016-2017, menyatakan bahwa sekitar 85% dari peserta melaporkan bahwa mereka puas dengan proses perencanaan selama 2016-2017, dan secara tidak langsung mencerminkan peringkat dari proses implementasi NDIS berjalan baik sangat baik yang relatif tinggi.

NDIS menempatkan penyandang disabilitas sebagai pusat dan pemegang kendali utama terhadap akses layanan yang dibutuhkannya melalui NDIS. Disamping itu, penyandang disabilitas tetap akan mendapatkan berbagai macam dukungan lainnya diluar NDIS (*community support*) dan layanan terkait disabilitas lainnya sesuai dengan enam tujuan NDS seperti *health, housing, transport, education and justice*. Keterlibatan keluarga dan orangtua dalam proses implementasi NDIS menjadi hal

yang penting untuk dilakukan (*informal supports*). Lebih lanjut, proses implementasi NDIS telah disetujui oleh semua negara bagian dan teritori. Sehingga memudahkan partisipan atau penyandang disabilitas untuk dengan mudah mengakses NDIS terdekat.

Terkait pendanaan NDIS, terhitung pada tanggal 30 juni 2017, dukungan pendanaan senilai \$ 7,3 milyar telah diberikan kepada para partisipan melalui NDIS (NDIS, 2018). Dan merupakan hasil *funding* yang dilakukan oleh Pemerintah Australia (Federal) serta negara bagian dan teritori. Dengan rincian dana sebesar \$ 1,5 milyar diberikan pada saat NDIS (*trial 2013-2015*). Pendanaan sebesar \$ 3,2 milyar terkait dengan dukungan NDIS yang dilakukan pada tahun 2016-2017 dan pendanaan \$ 2,6 miliar terkait dengan dukungan yang dilakukan pada tahun 2017-18 dan seterusnya.

Lebih lanjut, terdapat beberapa kategori layanan disabilitas yang dapat diakses melalui NDIS. Sesuai dengan standar layanan disabilitas dalam NDIS terdapat tiga kategori utama layanan yang dapat diakses. Pertama, kategori *Core Supports* meliputi bantuan dalam kehidupan sehari-hari (*assistance*), transportasi, konsumsi, bantuan dalam partisipasi sosial dan kemasyarakatan (*assistance*). Kedua, kategori *Capital Support* meliputi teknologi bantu, modifikasi rumah. Ketiga, kategori *Capacity Building Services* meliputi koordinasi dukungan, pengaturan hidup yang lebih baik, peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, menemukan dan mempertahankan pekerjaan, meningkatkan hubungan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, peningkatan pembelajaran, peningkatan pilihan hidup, dan peningkatan kehidupan sehari-hari.

b) *Aboriginal and Torres Strait Islander People with disability*

Seperti yang diketahui, penyandang disabilitas yang merupakan penduduk aborigin dan kepulauan (*aboriginal and torres strait islander people with disability*), lebih cenderung sedikit memiliki akses dalam layanan disabilitas. lebih lanjut, hal ini menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan, mengingat penduduk aborigin dan kepulauan merupakan bagian dari pada Australia dan berhak untuk mendapatkan akses yang sama terkait layanan disabilitas. Penyelesaian

permasalahan terkait kesenjangan layanan disabilitas yang didapatkan oleh penyandang disabilitas penduduk aborigin dan kepulauan (*aboriginal and torres strait islander people with disability*), menjadi agenda spesifik yang dilakukan oleh semua tingkatan Pemerintah Australia pada tahap ke dua implementasi kebijakan NDS. Pada tahap ini, Pemerintah Australia menginginkan untuk terjadinya peningkatan akses terhadap semua layanan disabilitas untuk penduduk aborigin dan kepulauan.

Pada tahun 2009, Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan kebijakan *National Indigenous Reform Agreement* yang digunakan sebagai *framework* utama dalam penanganan disabilitas untuk *aboriginal and torres strait islander people with disability*. Pada tahap ini pemerintah pusat, negara bagian dan teritori berkomitmen untuk berusaha menyelesaikan permasalahan kesenjangan disabilitas yang di alami penduduk pribumi Australia. *Closing the Gap programme* menjadi program implementasi kebijakan utama yang direalisasikan oleh semua tingkatan Pemerintah Australia. Terdapat empat fokus peningkatan yang ingin dicapai untuk mengurangi tingkat kesenjangan terkait layanan disabilitas oleh *aboriginal and torres strait islander people with disability*, seperti ; *infancy and early childhood, education, employment, economic development, healthy lives*.

1) *Infancy and early childhood*

Pemerintah Australia memiliki sejumlah program yang memprioritaskan investasi pada kesehatan anak dan ibu untuk penduduk aborigin Australia. Pendanaan sebesar \$ 94 juta diinvestasikan selama tiga tahun (2015-2018) melalui pendekatan *Better Start to Life*. Dengan perincian dua program perluasan yaitu *Australian Nurses Family Partnership Program and New Directions: Mother and Infant Service Program* (Australia C. o., 2018). Untuk mendanai berbagai inisiatif anak usia dini untuk mendukung ibu muda, orang tua dan keluarga. Termasuk kelompok bermain yang difasilitasi, kelas pengasuhan, program kunjungan ke rumah dan penjangkauan. Kegiatan-kegiatan ini membangun pengetahuan dan keterampilan orang tua dan mempromosikan perkembangan anak-anak yang sehat.

Pada tahun 2010, melalui *National Partnership Agreement (NPA)* terkait akses universal ke pendidikan anak usia dini. Pemerintah pusat (Federal) telah menyalurkan dana sebesar \$ 3,2 miliar kepada negara bagian dan teritori (Australia C. o., 2018). Untuk memastikan setiap anak Australia memiliki akses ke program pendidikan anak usia dini yang berkualitas termasuk didalamnya untuk penduduk pribumi atau aborigin. Pada tahun 2016, dari semua anak aborigin atau pribumi yang terdaftar dalam pendidikan anak usia dini, 93% telah mengikuti program pendidikan anak usia dini selama setidaknya satu jam dalam seminggu. Porsentase ini mendekati angka program pendidikan anak usia dini oleh non-pribumi sebesar 96 %.

2) *Education*

Melalui *Aboriginal and Torres Strait Islander National Education Policy (AEP)*. Pemerintah Australia telah menguraikan tujuan-tujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan yang mendukung siswa dan komunitas aborigin dan *torres strait islander*. Pada tahun 2014, melalui *Indigenous Advancement Strategy (IAS)* telah menyediakan lebih dari \$ 1,3 miliar untuk mendukung komunitas aborigin dan *torres strait islander* dari tahun-tahun awal masa kanak-kanak mereka (Australia C. o., 2018). Termasuk didalamnya pendidikan dasar dan menengah, hingga kualifikasi pasca sekolah dan masuk ke dunia kerja.

Pada 2017, *Indigenous Peoples Scholarship Program and Indigenous Support Program* menyediakan dana tambahan untuk universitas. Program ini menawarkan pemberian beasiswa, tutorial, dan bantuan lainnya kepada 18.000 mahasiswa Aborigin dan *Torres Strait Islander* Australia. Dan telah diimplementasikan ke 40 universitas di seluruh Australia.

3) *Employment*

Pada tahun 2015 Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan layanan pekerjaan dipusat-pusat perkotaan dan regional untuk menampung pekerja pribumi yang diberinama *Jobactive*. Pada bulan Juli 2015, sekitar 81.000 penempatan kerja telah dapat diakses oleh penduduk pribumi atau aborigin Australia (Australia C. o., 2018). Lebih lanjut, pada tahun yang sama pemerintah

bersama *community development services* (CDP) melalui program berbasis komunitas yang difokuskan untuk membantu pencari kerja untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman terkait pekerjaan, mengatasi hambatan, dan mendapatkan pekerjaan. Dan telah disampaikan ke 60 wilayah dan lebih dari 1.000 komunitas. Program ini telah mendukung pencari kerja jarak jauh untuk mengakses sekitar 21.600 pekerjaan (termasuk lebih dari 15.700 pekerjaan untuk pribumi Australia).

Tahun 2018, pemerintah memperkenalkan perluasan cakupan dalam *Transition Services to the Workplace program*. Untuk semua penduduk aborigin dan *torres strait islander* usia 15-21 yang tidak bekerja atau belajar. Layanan ini menyediakan dukungan pra-pekerjaan secara intensif untuk meningkatkan kesiapan kerja anak-anak muda dan membantu mereka bekerja (termasuk pelatihan dan pelatihan awal) atau pendidikan. Diperkirakan bahwa sekitar 4.600 pemuda per tahun akan mendapatkan manfaat dari layanan ini.

4) *Healthy lives*

Melalui *Aboriginal National Health and Torres Strait Islander 2013-23 Plan*. Strategi Pemerintah Australia untuk memberikan hasil kesehatan yang lebih baik bagi penduduk aborigin Australia. Pemerintah telah mengalokasikan pendanaan sebesar \$ 3,6 milyar selama empat tahun (dari 2014-18), diberikan melalui *The Indigenous Health Program of Australia* untuk menerapkan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam rencana pelaksanaan kesehatan. Pada 2015-16, 4,8 juta skrip pembayaran dan subsidi pengobatan telah dikeluarkan dan telah membantu lebih dari 277.000 pasien (Services D. o., 2015). Lebih lanjut, pada tahun 2018 jumlah asuransi kesehatan untuk penduduk aborigin dan *torres strait islander* dalam NDIS terus mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Melakukan kerjasama dengan NGO terkait layanan disabilitas

Dalam proses implementasi suatu kebijakan dapat dipastikan bahwa kerjasama dan koordinasi menjadi hal yang perlu untuk dilakukan. Kerjasama dari semua pihak menjadi kunci utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan probabilitas

terimplementasinya kebijakan secara efektif dan efisien. Keadaan ini kemudian menjadi rujukan Pemerintah Australia dan NGO untuk menjalin kerjasama dalam implementasi kebijakan terkait layanan disabilitas. Sebelumnya, dalam ranah implementasi kebijakan NDS 2010-2020 Pemerintah Australia telah berhasil melakukan kerjasama dengan agensi-agensi layanan disabilitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti NDIA. Namun, disisi lain terdapat NGO yang menjadi lembaga non-profit yang memiliki peran sebagai pemberi masukan dan *review* terkait kebijakan Pemerintah Australia serta advokasi terkait layanan disabilitas yaitu *The Australian Federation of Disability Organisations* (AFDO).

AFDO merupakan sebuah organisasi perkumpulan *Disability People's Organizations* (DPO), yang terdiri dari 16 organisasi yang tersebar diseluruh wilayah Australia. Organisasi ini memiliki empat tugas utama seperti ; mendukung organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas, melobi pemerintah dan lembaga lain tentang isu-isu disabilitas, menasihati pemerintah dan organisasi lain tentang kebijakan disabilitas mereka, menginformasikan dan mendidik masyarakat umum tentang disabilitas, dan meneliti masalah disabilitas. Misi utama AFDO ialah untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan membantu mereka berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan Australia. Keanggotaan terbuka untuk organisasi nasional dan negara penyandang disabilitas. hal ini kemudian menjadikan skala wawasan dan jangkauan terkait isu disabilitas yang dimiliki AFDO cenderung bersifat komprehensif. Kemudian, menjadi organisasi nasional utama yang mengadvokasi kepada Pemerintah terkait kepentingan semua orang penyandang disabilitas di Australia.

Dalam proses implementasi kebijakan *National Disability Services* tahap pertama, AFDO melakukan review terkait kebijakan tersebut dan memberikan masukan terkait implementasi kebijakan. Pada tahun 2014, AFDO yang mewakili mayoritas suara organisasi nasional memberikan masukan melalui laporan *Disabled People's Organizations Australia : Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-20120* (SCARCI, 2014). Laporan ini menjelaskan bahwa dalam proses implementasi NDS 2014, penyandang disabilitas belum secara komprehensif

diikutsertakan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Hal yang serupa juga di sampaikan oleh *Disabled People's Organizations Australia* yang menyatakan bahwa dalam Strategi Nasional Disabilitas Australia juga harus memperhatikan pemenuhan hak penduduk asli Australia yaitu penduduk aborigin penyandang disabilitas. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa perlunya terjadi peningkatan keterlibatan penduduk pribumi Australia seperti aborigin dan *torres strait islander people*. Permasalahan kesenjangan dalam proses layanan disabilitas masih banyak di alami oleh mereka. Oleh karenanya, melalui laporan tersebut AFDO sebagai federasi DPO Australia melakukan advokasi terkait keterlibatan dan peningkatan hak akses layanan disabilitas oleh penduduk aborigin dan *torres strait islander*.

Peninjauan kembali terkait implementasi yang dilakukan oleh AFDO menjadi masukan yang penting untuk dipertimbangkan dan mendapat respon baik dari Pemerintah Australia. Lebih spesifik, *review* ini menjadi bahan masukan (input) dalam proses implementasi kebijakan *NDS tahap kedua Driving Action 2015-2018*. Peningkatan keterlibatan serta hasil implementasi kebijakan ini menunjukkan perubahan positif yang signifikan terhadap kualitas layanan disabilitas terhadap penduduk aborigin dan *torres strait islander people*. Kerjasama yang baik antara NGO disabilitas dengan Pemerintah Australia ini telah secara tidak langsung meningkatkan akses pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, AFDO juga memberikan tanggapan positif terkait program utama NDS yaitu NDIS dengan menempatkan bentuk jaminan asuransi sosial bagi para penyandang disabilitas untuk dapat mengakses hak dan kebutuhannya. Pendekatan *person-centered* menjadi hal yang sangat krusial untuk tetap dilakukan untuk menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Lebih lanjut, AFDO melakukan kerjasama dengan Pemerintah Australia terkait pelayanan advokasi dan *mainstreaming* informasi terkait akses NDIS, untuk membantu penyandang disabilitas Australia dalam mengakses hak dan kebutuhannya. Dibawah kerjasama ini, AFDO menginisiasi untuk terbentuk aplikasi dan laman *website Disability Loop* untuk membantu penyandang disabilitas di seluruh wilayah Australia untuk dapat mengakses

informasi dan berdiskusi mengenai NDIS. *Disability Loop* menyediakan yang komprehensif terkait informasi, administrasi, dan akses pendanaan terkait NDIS untuk semua wilayah Australia.

Kerjasama antara Pemerintah Australia dengan AFDO telah menghadirkan alternatif advokasi terkait akses layanan disabilitas yang lebih mudah bagi seluruh penyandang disabilitas Australia. Pemerintah Australia telah bersama dengan NGO disabilitas telah berusaha secara maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut, menurut pendapat Risnawati Utama yang menyatakan terkait implementasi kebijakan publik seperti layanan disabilitas, kunci utama yang harus dipegang ialah koordinasi dan kerjasama antar semua pihak untuk mau terlibat dalam proses tersebut (Utami, 2018). Dalam kasus implementasi kebijakan layanan disabilitas di Australia, inisiatif untuk terjadinya koordinasi antar tingkat pemerintah telah sejak lama dilakukan. Dan perkembangan layanan disabilitas di Australia sangat dinamis. Maka tidak menjadi sesuatu yang mengherankan Australia menjadi salah satu contoh negara yang memiliki layanan yang baik untuk disabilitas. Karena semua pihak bersinergi bersama untuk memenuhi kebutuhan disabilitas salah satunya dengan maksimalisasi implementasi kebijakan.

D. Kesimpulan

Disabilitas menjadi salah satu isu kemanusiaan yang menjadi perhatian saat ini. Penyandang disabilitas yang sebelumnya menjadi objek yang dikenai suatu kebijakan, mulai merubah peran mereka untuk kemudian menjadi subjek dalam proses perumusan kebijakan. Tindakan afirmasi ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak mereka secara lebih legal dan mendapatkan perlakuan yang inklusif dari masyarakat. Lebih lanjut isu kemanusiaan yang menarik perhatian dunia internasional. PBB sebagai lembaga keamanan internasional telah mengeluarkan konvensi terkait hak penyandang disabilitas UNCRPD untuk menjadi dasar perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas dunia. Australia menjadi salah satu negara yang mengimplementasikan nilai dan norma UNCRPD, kedalam proses perumusan serta implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, dengan menggunakan konsep universal desain dan pendekatan *person-centered* yang lebih komprehensif, Pemerintah Australia berusaha untuk menciptakan keadaan yang *disability-friendly* terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan skala nasional yaitu *National Disability Strategy 2010-2020* untuk meningkatkan pelayanan terhadap disabilitas, dengan dua tahap implementasi yaitu *Laying Groundwork 2011-2014* dan *Driving Action 2015-2018*. Dalam penanganan dan implementasi kebijakan, Pemerintah Australia (Federal) melakukan koordinasi dengan semua tingkatan pemerintah yaitu negara bagian, teritori, penyandang disabilitas dan NGO terkait, untuk bersama mengimplementasikan Kebijakan *National Disability Strategy*.

Oleh karenanya berlandaskan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah ramah/friendly, karena telah memiliki kebijakan yang berskala nasional, komprehensif dan bersifat universal. Lebih lanjut, koordinasi dan kerjasama antar semua tingkatan pemerintah, NGO dan penyandang disabilitas dalam proses implementasi kebijakan menjadi tindakan yang signifikan untuk mendukung terciptanya suatu keadaan yang ramah terhadap disabilitas.

E. Daftar Pustaka

- ABS. (2015, Juni 30). *Australian Demographic Statistics*. Retrieved April 20, 2018, from [www.abs.gov.au: http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Previousproducts/3101.0Main%20Features1Jun%202015](http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Previousproducts/3101.0Main%20Features1Jun%202015).
- ABS. (2010, Januari 15). *Disability in Australia*. Retrieved Februari 10, 2018, from [www.abs.gov.au: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4446.0Main%20Features42009?opendocument&tabname=Summary&prodno=4446.0&issue=2009&num=&view=](http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4446.0Main%20Features42009?opendocument&tabname=Summary&prodno=4446.0&issue=2009&num=&view=).
- AHRC. (2018, Maret 18). *25 years of the Disability Discrimination Act*. Retrieved Juni 10, 2018, from [www.humanrights.gov.au: https://www.humanrights.gov.au/news/opinions/25-years-disability-discrimination-act](https://www.humanrights.gov.au/news/opinions/25-years-disability-discrimination-act)
- Al-Fadhat, F. (2018, April 24). Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. (Nurinayah, Interviewer)
- Australia, C. o. (2018). *Cloasing the Gap Australian Prime's Minister*. Canberra: Commonwealth of Australia.
- Australia, C. o. (2013). *DisabilityCare Australia*. Canberra: Commonwealth of Australia .
- Australia, G. o. (2014). *Disability Services* . Retrieved Juli 22, 2018, from [disability.wa.gov.au: http://www.disability.wa.gov.au/individuals-families-and-carers/for-individuals-families-and-carers/disability-justice-centre/](http://www.disability.wa.gov.au/individuals-families-and-carers/for-individuals-families-and-carers/disability-justice-centre/)
- cities, D. o. (2011). *Transport for People with Disability*. Retrieved Juni 20, 2018, from [infrastructure.gov.au: https://infrastructure.gov.au/transport/disabilities/](https://infrastructure.gov.au/transport/disabilities/).
- Devenish, A. (2013, Agustus 26). *New voting system gives Blind and Low Vision voters more choice*. Retrieved Juli 22, 2018, from [www.abc.net.au: http://www.abc.net.au/rampup/articles/2013/08/26/3833791.htm](http://www.abc.net.au/rampup/articles/2013/08/26/3833791.htm)
- DFAT. (2009, Juni 10). *Development for All: Towards a disability-inclusive Australian aid program 2009-2014*. Retrieved Januari 19, 2018, from [dfat.gov.au: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-towards-a-disability-inclusive](http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-towards-a-disability-inclusive)
- Killens, G. (2014, Januari 8). *Transport accessibility in Australia today - Part 2*. Retrieved Juni 20, 2018, from [www.abc.net.au: http://www.abc.net.au/rampup/articles/2014/01/08/3921112.htm](http://www.abc.net.au/rampup/articles/2014/01/08/3921112.htm).
- Lord, J. (2010). Disability and International Cooperation and Development: A Review of Policies and Practices . *Policies and Practices . Social Protection & Labor Journal* , 2-3.
- NDIS. (2018). *Improving the NDIS Participant and Provider Experience*. Canberra: NDIS.

- NDSCR. (2009). *Shut Out: The Experience of People with Disabilities and Their Families in Australia*. Canberra: Australian Government.
- Santi Utami Dewi, L. S. (2018, Maret 28). Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas . (Nurinayah, Interviewer)
- SCARCI. (2014). *Disabled People's Organizations Australia : Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities*. Canberra: Senate Community Affairs References Committee Inquiry.
- SCARCI. (2014). *Disabled People's Organizations Australia : Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities*. Canberra: Senate Community Affairs References Committee Inquiry.
- Services, D. o. (2014). *2010–2020 National Disability Strategy : Progress Report to the Council of Australian Governments*. Canberra: Department of Social Services.
- Services, D. o. (2014). *Guide to the List of Recognised Disabilities*. Retrieved April 20, 2018, from www.dss.gov.au: <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/benefits-payments/carer-allowance/guide-to-the-list-of-recognised-disabilities>
- Services, D. o. (2015). *National Disability Strategy Second Implementation Plan Driving Action 2015–2018*. Canberra: Department of Social Services.
- Services, D. o. (2017). *NDIS Annual Report*. Canberra: Departmen of Social Services.
- Surwanti, A. (2018, April 04). Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. (Nurinayah, Interviewer)
- UN. (2014). *The United Nations and Persons with Disabilities Chronology: 1980's – present*. Retrieved Mei 17, 2018, from www.un.org: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/history-of-disability-and-the-united-nations/the-unit>
- UNCRPD. (2009, Juni 11). *Convention on the Right of People with Disability*. Retrieved Februari 10, 2018, from www.un.org: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>)
- UNESCAP. (2012). *Strategi Incheon untuk Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik* . Bangkok: UNESCAP.
- Utami, R. (2018, Maret 28). Kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. (Nurinayah, Interviewer)